

Transformasi Kaum Akademisi Menjadi Intelektual Organik untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia

Rikardus Mantero^{1*}

¹Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Pos-el/Phone number: rikardusmantero@gmail.com/082147664575

Diajukan: Maret, 2024; **Direview:** Maret, 2024; **Diterima:** Juni 11, 2024; **Dipublish:** Juni, 2024

Abstract

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh situasi demokrasi Indonesia yang sedang berada dalam “guncangan hebat” dari rezim anti demokrasi. Bahwasanya, akhir-akhir ini, ada banyak fenomena politik Indonesia yang tidak menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini ialah merefleksikan dan mendeskripsikan alasan-alasan penting yang menjadi landasan untuk menjadi intelektual organik di negara demokrasi, seperti Indonesia. Pada titik ini, penulis berusaha mengajak kaum akademisi untuk bertransformasi menjadi intelektual organik dalam negara demokrasi. Untuk mengelaborasi semuanya itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka sebagai cara untuk mengumpulkan data. Dari kajian tersebut, penulis menemukan hasil studi yang menunjukkan 5 (lima) peran penting dari intelektual organik yang dapat menjadi dasar atau landasan kaum akademisi untuk bertransformasi menjadi intelektual organik, sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia, antara lain: a) mendorong perubahan dan kemajuan dalam masyarakat; b) menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata; c) mengartikulasikan pikiran dan perasaan dengan bahasa yang tepat; d) memobilisasi kesadaran politik; dan e) menantang struktur kekuasaan yang ada.

Key words: Demokrasi, Intelektual Organik, Intelektual Tradisional, Kaum Akademisi, dan Transformasi.

Pendahuluan

Demokrasi itu bukan hanya soal angka (aspek kuantitatif) seperti menjadikan rakyat sebagai *voters* dalam Pemilihan Umum (pemilu) atau soal perolehan suara saat pemilu. Demokrasi lebih dari itu karena demokrasi lebih berkaitan dengan “spirit” yang menjadi dasar kehidupan bersama, baik sebagai kelompok, komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada titik ini, aspek kualitatif yang ditekankan melalui perwujudan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, keadilan, supremasi hukum, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain.

Menurut Afan Gaffar, sebagaimana tertulis dalam buku berjudul *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*, dalam ilmu politik, ada 2 (dua) macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.¹ Namun, hal yang harus diperhatikan ialah bahwa pemahaman secara normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks

¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3.

kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara.² Oleh karena itu, selain pemahaman secara normatif, pemahaman secara empirik juga perlu dilihat dan diuraikan.

Pemahaman demokrasi secara empirik berkaitan dengan perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik praktis.³ Untuk menjelaskan pemahaman demokrasi secara empirik, Gaffar meringkas indikator-indikator demokrasi secara empirik menurut Robert Dahl, antara lain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, dan menikmati hak-hak dasar.⁴

Terkait akuntabilitas, Gaffar menulis:

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak-keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya.⁵

Akhir-akhir ini, fenomena politik di Indonesia menunjukkan perilaku, ucapan, dan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menunjukkan indikator akuntabilitas dari demokrasi. Misalnya, Jokowi mengatakan, Presiden boleh berkampanye dan memihak dengan berlandaskan pada Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 281 UU Pemilu yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi jika Presiden dan Wakil Presiden berkampanye.⁶ Menurut Muchamad Ali Safa'at, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, dukungan seorang Presiden kepada salah satu pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden (capres-cawapres) akan sangat menguntungkan pasangan calon tersebut. Dukungan tersebut tidak mewujudkan keadilan elektoral. Apalagi, calon yang didukung berpolemik dan anaknya sendiri yang dipandang memiliki masalah dari sisi etika.⁷ Di samping itu, Jokowi tidak membaca pasal dan ayat Undang-undang secara komprehensif. Jokowi membaca Undang-undang dengan pasal dan ayat-ayatnya secara parsial hanya untuk merasionalisasi ucapan, perilaku, dan tindakannya. Hal itu disampaikan juga oleh Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember. Menurut Bivitri, ketentuan mengenai kampanye oleh pejabat publik tidak hanya diatur oleh pasal-pasal yang disebutkan oleh Jokowi. Ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 280, 281, 301 – 307 UU Pemilu. Oleh karena itu, Bivitri berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang, keterlibatan Presiden dalam kampanye dibatasi hanya sebagai peserta pemilu.⁸ Dengan demikian, Jokowi sesungguhnya melanggar ketentuan UU Pemilu.

Lalu, tentang rotasi kekuasaan, Gaffar menulis:

² *Ibid.*, hlm. 4.

³ *Ibid.*

⁴ Bdk. Afan Gaffar, *Ibid.*, hlm. 6 – 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁶ Bdk. Tim Kompas, “Presiden: Saya Sampaikan Ketentuan di UU Pemilu”, dalam *Kompas.id*, 27 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/26/presiden-saya-sampaikan-ketentuan-di-uu-pemilu>, diakses pada 13 Maret 2024.

⁷ Bdk. Defri Werdiono, “Presiden Ikut Kampanye, secara Etika Politik Menjadi Masalah”, dalam *Kompas.id*, 24 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/presiden-ikut-kampanye-secara-etika-politik-menjadi-masalah>, diakses pada 12 Maret 2024.

⁸ Bdk. Ikhsan Abdul Hakim, “Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Tidak Boleh Kampanye untuk Kandidat Tertentu, Melanggar Hukum”, dalam *Kompas.tv*, 24 Januari 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/479737/pakar-hukum-tata-negara-presiden-tidak-boleh-kampanye-untuk-kandidat-tertentu-melanggar-hukum>, diakses pada 11 Maret 2024.

Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula. Bahkan, peluang itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elite politik saja.⁹

Akhir-akhir ini, fenomena politik di Indonesia menunjukkan perilaku, ucapan, dan tindakan Jokowi yang tidak menunjukkan indikator rotasi kekuasaan yang dilakukan secara teratur, damai, jujur, dan adil. Sebab, Jokowi pernah berkeinginan untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode, memungkinkan anaknya menjadi cawapres dengan ‘menghancurkan’ Mahkamah Konstitusi (MK), dan membentuk koalisi haus kekuasaan yang dapat melanjutkan legitimasinya sendiri.

Terkait hal itu, dalam artikel berjudul “Demokrasi Buruk Rupa”, Yasraf A. Piliang, pemikir sosial dan kebudayaan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, pembusukan demokrasi menggiring pada pembusukan pemilu demokratis yang ditandai dengan manipulasi aturan hukum bernuansa nepotisme melalui MK untuk meloloskan cawapres tertentu.¹⁰ Senada dengan Piliang, Boni Hargens, dalam artikel berjudul “Pemilu 2024 dan Roh Demokrasi”, mengatakan, putusan MK soal usia calon presiden/wakil presiden adalah benturan keras pertama dan dilanjutkan dengan guncangan susulan seperti pencalonan putra Presiden Jokowi sebagai wakil presiden dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).¹¹ Pada titik ini, Piliang dan Hargens sepakat bahwa pencalonan cawapres yang sarat nepotisme telah membusukkan dan mengguncangkan demokrasi.

Kemudian, tentang sistem rekrutmen politik yang terbuka, Gaffar menulis:

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.¹²

Akhir-akhir ini, fenomena politik di Indonesia menunjukkan perilaku, ucapan, dan tindakan Partai Politik (parpol) yang tidak menunjukkan indikator rekrutmen politik yang terbuka. Sebab, ada parpol tertentu yang memungkinkan seseorang menjadi Ketua parpol setelah 2 (dua) hari menjadi anggota parpol. Aneh bin ajaib, tapi hal itu tampak nyata dalam tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal, PSI yang didirikan pada 16 November 2014 sudah memiliki kader yang sudah berpengalaman dan kompeten untuk menjadi Ketua parpol ketimbang Kaesang Pangarep yang baru 2 (dua) hari jadi anggota parpol. Apalagi, rekam jejak atau latar belakang Pangarep ialah seorang pengusaha makanan dan *youtuber* saja. Dia tidak mempunyai rekam jejak atau latar belakang anggota atau Ketua parpol lain sebelumnya.

Selain itu, terkait pemilu, Gaffar menulis:

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan

⁹ Afan Gaffar, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Yasraf A. Piliang, “Demokrasi Buruk Rupa”, dalam *Kompas.id*, 12 Februari 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/11/demokrasi-buruk-rupa>, diakses pada 12 Maret 2024.

¹¹ Boni Hargens, “Pemilu 2024 dan Roh Demokrasi”, dalam *Kompas.id*, 18 November 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/17/pemilu-2024-dan-roh-demokrasi>, diakses pada 10 Maret 2024.

¹² Afan Gaffar, *loc. cit.*

didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.¹³

Akhir-akhir ini, fenomena politik di Indonesia menunjukkan situasi pemilu yang curang. Ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu, sejak penentuan dan pendaftaran calon sampai dengan proses rekapitulasi suara. Tentunya, pemilu yang curang sangat menodai demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan kejujuran.

Hal itu diuraikan secara jelas oleh Piliang dalam artikel berjudul “Demokrasi Buruk Rupa”. Piliang mengatakan, tanda-tanda pemilu yang ugul-ugalan itu tampak nyata dalam pemilu 2024 yang ditandai dengan dominasi kekuatan oligarki, mafia dan kartel politik, politik transaksional, klientelisme dalam pemilu, penggunaan cara-cara otoritarianisme dalam menghadapi berbagai kekuatan dan gerakan sosial, serta pemberangusan aneka gerakan masyarakat sipil.¹⁴ Di samping itu, Piliang juga mengatakan, pemilu yang curang itu tampak nyata dalam intervensi negara dalam proses pemilu yang menunjukkan sifat partisan dan tak netral, mobilisasi aparaturnya untuk mengarahkan pilihan pemilih, serta cara-cara komunikasi politik yang menggerus norma publik.¹⁵

Pilpres 2024, lanjut Piliang, juga diramalkan oleh panggung teater ketakadaban (*incivility*) yang menunjukkan aneka sandiwara politik dengan lakon-lakon yang menampilkan bahasa sarkastis, gestur ironis, dan gimik bombastis. Ironisnya, negara yang mestinya menjaga dan mengawal proses pemilu demokratis yang berkeadaban – langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil – justru menjadi bagian dari kelicikan, keculasan, kebohongan, dan kecurangan itu.¹⁶ Dengan demikian, jelas bahwa pemilu di Indonesia saat ini tidak menunjukkan indikator pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

The last but not least, mengenai keterjaminan hak-hak dasar, Gaffar menulis, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas.¹⁷ Akhir-akhir ini, fenomena politik di Indonesia menunjukkan perilaku, ucapan, dan tindakan penguasa atau pemerintah yang tidak menunjukkan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat Indonesia. Sebab, ada banyak masyarakat Indonesia yang direpresi oleh pemerintah karena menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah, ada banyak kelompok atau komunitas yang dibubarkan atau diusir saat menggelar diskusi publik tentang situasi sosial dan politik yang *chaos*, serta ada banyak media massa atau pers dan akun media sosial (*medsos*) yang diberedel atau diretas oleh pemerintah karena menyampaikan atau menginformasikan keburukan dan kejahatan dari pemerintah. Terkait hal itu, dengan mengutip Marcus Mietzner, Piliang dalam artikel berjudul “Malu Menjadi Bangsa” mengatakan, salah satu tanda hancurnya demokrasi ialah negara membungkam suara publik hingga memasung kebebasan sipil (*illiberalism*).¹⁸ Di samping itu, menurut Sukidi, Pemikir Kebinekaan, dalam analisis politik berjudul “Demokrasi di Ujung Kematian”, defisitnya keterjaminan hak-hak dasar dalam suatu negara yang demokratis ditunjukkan oleh 2 (dua) hal utama dalam demokrasi, yaitu toleransi

¹³ *Ibid.*, hlm. 8 – 9.

¹⁴ Yasraf A Piliang, *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Afan Gaffar, *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁸ Yasraf A Piliang, “Malu Menjadi Bangsa”, dalam *Kompas.id*, 5 januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/04/malu-menjadi-bangsa>, diakses pada 9 Maret 2024.

dan kebebasan, yang tidak diberlakukan secara adil dan setara. Persaingan politik pun terpolarisasi antara mereka yang "bersama penguasa" dan "melawan penguasa".¹⁹

Para elite politik yang loyal "bersama penguasa", lanjut Sukidi, memperoleh hak keistimewaan politik, termasuk hak toleransi dan kebebasan. Namun, hak-hak itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak loyal kepada penguasa. Politik ketakutan, intimidasi, dan kriminalisasi menjadi senjata ampuh bagi penguasa otokratik untuk menekan mereka yang berani "melawan penguasa". Sumber daya negara sering kali dipakai untuk mempersulit pihak-pihak yang terstigmatisasi tak loyal kepada penguasa. Situasi ini membunuh kekuatan oposisi yang kritis.²⁰

Berdasarkan situasi-situasi pelik di atas, tampak bahwa ada yang "sakit" dengan demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi Indonesia mengalami "guncangan hebat" dari rezim anti demokrasi. Maka, hemat penulis, intelektual organik-lah yang mempunyai potensi untuk "menempatkan" demokrasi pada posisi dan situasi yang seharusnya.

Sebab, menurut Angga Indraswara, rohaniwan dan mahasiswa Doktoral Ilmu Politik di *London School of Economics* (LSE), dalam artikel berjudul "Ketidakniscayaan Demokrasi Indonesia", warga negara telah terbuai dengan beragam narasi keberhasilan pembangunan. Tidaklah mengherankan sebagian warga memilih diam atau justru malah membela elite penguasa ketika keberhasilan demokrasi Indonesia dilucuti satu per satu.²¹ Di samping itu, survei yang dilakukan oleh Asian Barometer, sebagaimana dikutip oleh Wijayanto dalam artikel berjudul "Memperkuat Budaya Demokrasi", menghasilkan temuan menarik tentang rendahnya dukungan masyarakat Indonesia pada demokrasi. Tampak bahwa masyarakat umum tak melihat demokrasi sebagai satu sistem untuk melindungi hak warga negara, kompetisi pemilu yang adil, dan pengawasan terhadap kekuasaan.²² Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan dan mendeskripsikan alasan-alasan penting yang menjadi landasan kaum akademisi untuk bertransformasi menjadi intelektual organik di negara demokrasi, seperti Indonesia. Apalagi menurut Vedi R. Hadiz, ilmuwan sosial Indonesia yang bekerja sebagai *Professor of Asian Studies* dan Direktur pada Asia Institute, University of Melbourne, Australia, di Indonesia sudah terlalu banyak intelektual tradisional. Ironisnya, kita sangat kekurangan intelektual organik. Padahal intelektual organik yang bisa menyerukan suara kenabian yang berjuang bagi kepentingan kaum *voiceless* yang sering termarginalkan.²³

Intelektual Tradisional dan Intelektual Organik

Antonio Gramsci, filsuf Italia, penulis, teoritikus politik, dan Marxian, yang dipenjarakan oleh rezim Mussolini pada 1930-an, menulis dari penjara bahwa pada dasarnya semua orang adalah intelektual karena semua mereka dikaruniai akal budi, tetapi tidak semua orang menjalankan peran dan fungsi intelektual.²⁴ Dengan tulisan itu, Gramsci hendak mengkritisi peran intelektual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Gramsci, semua orang pada dasarnya adalah

¹⁹ Sukidi, "Demokrasi di Ujung Kematian", *Kompas*, 4 Januari 2024, hlm. 1 - 15.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Angga Indraswara, "Ketidakniscayaan Demokrasi Indonesia", dalam *Kompas.id*, 5 Februari 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/04/ketidakniscayaan-demokrasi-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2024.

²² Wijayanto, "Memperkuat Budaya Demokrasi", dalam *Kompas.id*, 22 Februari 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/21/memperkuat-budaya-demokrasi>, diakses pada 8 Maret 2024.

²³ Bdk. Albertus Patty, "Intelektual Tradisional & Organik?", dalam *Nalarpolitik.com*, 11 April 2021, <https://nalarpolitik.com/intelektual-tradisional-organik/>, diakses pada 17 Maret 2024.

²⁴ Ignas Kleden, *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 2.

intelektual yang mampu berpikir secara rasional, tetapi tidak semua orang memanfaatkan intelektualitasnya untuk memajukan masyarakat. Intelektual modern, lanjut Gramsci, bukan hanya berbicara dan mengajarkan suatu ilmu, melainkan juga turut ambil bagian dalam pembangunan hegemoni/pengaruh.²⁵

Orang-orang yang menjalankan fungsi intelektual dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Golongan yang pertama dinamakan intelektual tradisional. Ignas Kleden, dalam buku yang berjudul *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka*, mengatakan, intelektual tradisional ini menjalankan pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, tanpa banyak mempersoalkan segala sesuatu yang dilakukannya.²⁶ Selain itu, dalam artikel yang berjudul “Ruang Publik dan Intelektual Organik”, Syarif Maulana, Dosen Telkom University, mengatakan, intelektual tradisional menurut Gramsci adalah intelektual yang menempatkan dirinya sebagai strata yang terpisah dari masyarakat. Intelektual semacam ini tinggal di “menara gading” institusi akademik dan hanya berkutat dengan teori-teori yang tidak praktis bagi lingkungan sosial.²⁷ Seorang intelektual tradisional, kata Gramsci, melakukan kegiatan belajar mengajar hanya di lingkungan akademiknya sendiri. Ia terikat dengan situasi dan kondisi di sekitarnya, sehingga tidak bisa berbagi ilmu secara bebas.²⁸ Lebih dari itu, menurut Aimee Carrillo Rowe, *Professor of Communication Studies at California State University, Northridge*, dalam artikel berjudul “Romancing the Organic Intellectual: On the Queerness of Academic Activism”, intelektual tradisional membangun konsensus di antara massa dengan cara-cara yang menaturalisasi ketidakadilan kapitalisme.²⁹

Secara eksplisit, dalam artikel berjudul “Intelektual Tradisional & Organik?”, Albertus Patty mengatakan:

Menurut Gramsci, intelektual tradisional adalah mereka yang bertugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar menyepakati ide-ide yang dikehendaki oleh pemerintah. Kaum intelektual tradisional ini memberikan pengaruhnya dengan memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung kelas penguasa. Mereka adalah para dosen atau guru, pimpinan institusi, pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang dengan pengetahuan yang luas dan status yang kuat turut mendukung penyebaran isu yang dilempar oleh penguasa kepada masyarakat. Tentu saja fungsi mereka itu bukan sesuatu yang gratis. Ada kepentingan atau motif yang pasti menguntungkan posisinya. Oleh karena itu, kaum intelektual tradisional ini biasanya menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Kaum intelektual tradisional ini turut diuntungkan dengan adanya agenda penguasa. Jaminan tunjangan gaji, janji kenaikan pangkat, hibah proyek, dan keuntungan-keuntungan materi lain. Oleh karena itu, para intelektual tradisional sering menjadi akademisi yang membeo dan bahkan menjustifikasi berbagai kebijakan yang salah dan merugikan rakyat yang dilakukan oleh penguasa negara yang adalah kaum oligarki yang berkuasa.³⁰

Berbeda dengan intelektual tradisional, golongan kedua dinamakan intelektual organik. Ignas Kleden, dalam buku yang berjudul *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka*, mengatakan, fungsi intelektual organik bukanlah menjaga masyarakat seperti apa adanya, tetapi

²⁵ Syarif Maulana, “Ruang Publik dan Intelektual Organik”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12:1 (Yogyakarta, Juni 2015), hlm. 123.

²⁶ Ignas Kleden, *loc. cit.*

²⁷ Syarif Maulana, *op. cit.*, hlm. 123-124.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁹ Bdk. Aimee Carrillo Rowe, “Romancing the Organic Intellectual: On the Queerness of Academic Activism”, *American Quarterly*, 64:4 (The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, December 2012), hlm. 709 – 803.

³⁰ Bdk. Albertus Patty, *loc. cit.*

mendorong perubahan dan kemajuan dengan memperkenalkan cara berpikir baru sambil menciptakan selera dan kebutuhan baru.³¹

Selain itu, dalam artikel yang berjudul “Ruang Publik dan Intelektual Organik”, Syarif Maulana mengatakan, intelektual organik tidak berkutut dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, tetapi memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³² Sebagaimana dikutip Maulana, Gramsci menyebutkan, peran intelektual organik ialah memberi wawasan tentang bahasa pengetahuan dan bahasa ekspresi yang tepat agar masyarakat dapat mengartikulasikan hal-hal yang ia rasakan dan pikirkan. Melalui peran semacam itu masyarakat tidak akan mudah terjebak dalam dogma ideologi dari kaum borjuis yang dituangkan lewat hegemoni.³³

Sebagaimana dikutip juga oleh Maulana, Gramsci berpendapat bahwa intelektual organik berada di dua dunia sekaligus, yaitu dunia masyarakat di dalam sekolah dan dunia masyarakat di luar sekolah. Di dunia masyarakat di dalam sekolah, ia dipertemukan dengan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya lewat fasilitas kelas. Namun dalam hubungan dengan dunia masyarakat di luar sekolah, intelektual organik membutuhkan fasilitas yang membuat ia dapat bertemu dengan masyarakat, seperti ruang publik.³⁴

Lebih dari itu, menurut Aimee Carrillo Rowe, *Professor of Communication Studies at California State University, Northridge*, dalam artikel berjudul “Romancing the Organic Intellectual: On the Queerness of Academic Activism”, intelektual organik mengacu pada pengetahuan kelompok-kelompok “organik” di mana mereka berada, sekaligus memobilisasi kesadaran politik di antara kelompoknya masing-masing dan berbicara atas nama mereka.³⁵ Kemudian, Amit Chaudhuri, dalam artikel berjudul “The Organic Intellectual, Mystical Poetry, and the Rationalist Tradition in India Today”, mengatakan, intelektual organik memainkan peran penting dalam mengadvokasi kepentingan kelas atau kelompok sosial mereka, menantang struktur kekuasaan yang ada, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Mereka tidak terbatas pada lingkaran akademis atau profesional, tetapi secara aktif terlibat dengan dan mewakili keprihatinan komunitas mereka.³⁶

Secara eksplisit, dalam artikel berjudul “Intelektual Tradisional & Organik?”, Albertus Patty mengatakan:

Menurut Gramsci, intelektual organik adalah mereka yang dengan kesadaran dan pengetahuannya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda penguasa. Kaum intelektual ini menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, yaitu ilmu pengetahuan dan basis massa. Mereka berupaya melakukan *empowerment* (pemberdayaan), membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah sosial yang dialaminya. Mereka berkomitmen pada panggilannya untuk membela kepentingan masyarakat yang sering menjadi korban hegemoni dan dominasi penguasa dan kaum oligarki. Mereka bukanlah kaum yang suka membeo terhadap penguasa, tetapi mereka tidak

³¹ Ignas Kleden, *op. cit.*, hlm. 2-3.

³² Syarif Maulana, *op. cit.*, hlm. 123-124.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

³⁵ Bdk. Aimee Carrillo Rowe, *loc. cit.*

³⁶ Amit Chaudhuri, “The Organic Intellectual, Mystical Poetry, and the Rationalist Tradition in India Today”, *Social Research: An International Quarterly*, 88:4 (The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, Winter 2021), hlm. 973 - 1011.

anti terhadap penguasa. Mereka hanya konsisten mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang bermasalah dan yang mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.³⁷

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan, ada 5 (lima) peran atau fungsi intelektual organik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain: 1) intelektual organik tidak menjaga masyarakat seperti apa adanya, tetapi mendorong perubahan dan kemajuan dengan memperkenalkan cara berpikir baru sambil menciptakan selera dan kebutuhan baru; 2) intelektual organik tidak berkutat dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, tetapi memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; 3) intelektual organik memberi wawasan tentang bahasa pengetahuan dan bahasa ekspresi yang tepat agar masyarakat dapat mengartikulasikan hal-hal yang ia rasakan dan pikirkan; 4) intelektual organik mengacu pada pengetahuan kelompok-kelompok "organik" di mana mereka berada sekaligus memobilisasi kesadaran politik di antara kelompoknya masing-masing dan berbicara atas nama mereka; dan 5) intelektual organik memainkan peran penting dalam mengadvokasi kepentingan kelas atau kelompok sosial mereka, menantang struktur kekuasaan yang ada, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Dengan demikian, eksistensi intelektual organik dalam suatu negara demokrasi sangat penting.

Memperkuat Demokrasi Indonesia

Menurut Wijayanto, Pengajar Media dan Demokrasi Universitas Diponegoro, solusi bagi rapuhnya demokrasi ialah memperkuatnya, bukan membenarkan praktik yang memperlemah demokrasi untuk kemudian berpaling pada otoritarianisme.³⁸ Seharusnya, tugas memperkuat demokrasi itu ialah tugas semua elemen masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Namun, di tengah sikap, perilaku, dan tindakan pemerintah Indonesia yang tidak menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, lalu ditambah dengan sikap, perilaku, dan tindakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak peduli dengan demokrasi karena sudah terbuai oleh "kesadaran palsu" yang diciptakan oleh penguasa republik ini, harapan satu-satunya ialah intelektual organik. Hemat penulis, keberadaan intelektual organik sangat penting dalam usaha memperkuat demokrasi Indonesia saat ini, tidak hanya terjadi saat menjelang pemilu, tetapi juga pasca pemilu. Secara terperinci, peran atau fungsi intelektual organik dalam memperkuat demokrasi Indonesia akan dijelaskan berikut ini.

a. Mendorong Perubahan dan Kemajuan dalam Masyarakat

The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga dunia yang bermarkas di London, menunjukkan tren penurunan skor budaya demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam laporan EIU, budaya demokrasi Indonesia pernah mendapat skor yang lumayan pada 2015 dan 2016 sebesar 6,25 dari skala 1 – 10. Skor ini tidak buruk, meskipun juga tidak terlalu baik. Setelahnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2017 – 2019), skor ini turun dan stagnan di angka 5,63. Skor yang rendah itu menurun lagi menjadi 4,38 pada 2020 dan stagnan pada 2021, 2022, dan 2023. Tren penurunan ini seiring dengan penurunan nilai rata-rata indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun yang membenarkan pendapat berbagai ilmuwan politik tentang kemunduran demokrasi Indonesia.³⁹

Menurut Sukidi, Pemikir Kebinekaan, situasi itu menunjukkan demokrasi Indonesia sedang berada di ujung kematian.⁴⁰ Pertanyaannya: apakah masyarakat Indonesia mau membiarkan situasi itu

³⁷ Bdk. Albertus Patty, *loc. cit.*

³⁸ Wijayanto, *loc. cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bdk. Sukidi, *loc. cit.*

terus terjadi? Jika tidak menginginkan demokrasi Indonesia mati, siapakah yang harus berjuang untuk demokrasi Indonesia?

Sekali lagi, di tengah sikap, perilaku, dan tindakan pemerintah Indonesia yang tidak menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, lalu ditambah dengan sikap, perilaku, dan tindakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak peduli dengan demokrasi karena sudah terbuai oleh “kesadaran palsu” yang dikonstruksi oleh penguasa republik ini, harapan satu-satunya ialah intelektual organik. Sebab, menurut Ignas Kleden, intelektual organik tidak menjaga masyarakat seperti apa adanya, tetapi mendorong perubahan dan kemajuan dengan memperkenalkan cara berpikir baru sambil menciptakan selera dan kebutuhan baru.⁴¹ Dalam konteks ini, intelektual organik tidak akan menerima begitu saja situasi demokrasi yang berada di ujung kematian. Intelektual organik akan mendorong perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, supaya demokrasi Indonesia sungguh-sungguh terus berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi. Apalagi, dalam buku yang berjudul *Meretas Jalan Demokrasi*, Dadang Juliantara berpendapat bahwa secara prinsip, sistem demokrasi yang baik adalah sistem yang kualitasnya senantiasa terus berkembang ke arah yang lebih baik, sejalan dengan berbagai perubahan yang ada.⁴² Maka, hemat penulis, intelektual organik yang memiliki kapabilitas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia itu ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang ada saat ini.

Oleh karena itu, hemat penulis, kualitas-kualitas semacam itulah yang menjadi dasar atau alasan kaum akademisi untuk bertransformasi menjadi intelektual organik di Indonesia saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Dengan transformasi semacam itu, aktivitas dan karya kaum akademisi yang menyuarakan kritik dan memberi alarm kepada penguasa sebelum pemilu 2024 kemarin tidak berakhir sebagai kritisisme musiman. Apalagi, sebagai pihak yang punya akses atas informasi, kaum akademisi memang punya tanggung jawab untuk bisa menjelaskan sekaligus merumuskan segala sesuatu yang sedang terjadi.⁴³ Hemat penulis, jika kaum akademisi mau bertransformasi menjadi intelektual organik, bukan sekadar kaum akademisi yang belajar dan mengajar ilmu yang sama setiap tahun, demokrasi Indonesia akan berubah dan maju ke arah yang lebih baik.

Menurut Dadang Juliantara, kaum akademisi Indonesia perlu belajar dari intelektual organik seperti Adam Smith (1723 – 1790), David Ricardo (1772 – 1823), Karl Marx (1818 – 1883), dan Friederich Engels yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia. Kepedulian mereka yang sangat mendalam atas nasib manusia dan kemanusiaan, kata Juliantara, telah menjadi energi yang sangat dahsyat, sehingga melahirkan pemikiran dan tindakan yang berorientasi mengubah dan memperbaiki keadaan.⁴⁴

b. Menerapkan Pengetahuan dalam Kehidupan Nyata

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Syarif Maulana dalam artikel yang berjudul “Ruang Publik dan Intelektual Organik” mengatakan, intelektual organik tidak berkutat dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, tetapi memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Dalam hal ini, kaum intelektual organik tidak tinggal di “menara gading” dan hanya

⁴¹ Ignas Kleden, *loc. cit.*

⁴² Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 77.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Syarif Maulana, *op. cit.*, hlm. 123-124.

berurusan dengan tuntutan administrasi negara yang ruwet. Hati dan pikiran mereka selalu tergerak untuk turun dari “menara gading” dan bergumul serta terlibat dengan realitas kehidupan masyarakat guna menjelaskan marwah demokrasi dan situasi Indonesia yang sedang “sakit”.

Maka, mahasiswa dan dosen yang memegang label sebagai kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik yang menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata jika hendak menyelamatkan dan memperkuat demokrasi Indonesia. Sebab, menurut Vedi Hadiz, Indonesia sangat kekurangan intelektual organik. Padahal intelektual organik yang bisa menyerukan suara kenabian yang berjuang bagi kepentingan kaum *voiceless* yang sering termarginalkan.⁴⁶

Oleh karena itu, kaum akademisi Indonesia perlu bertransformasi menjadi intelektual organik yang tidak tinggal di “menara gading” dan hanya mengurus dengan tuntutan administrasi negara yang ruwet, tetapi selalu tergerak untuk turun dari “menara gading” dan bergumul serta terlibat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sebab, mahasiswa dan dosen tidak hidup dan eksis untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga berpikir dan melaksanakan segala sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Maka, kalau ada hal yang tidak adil saat pemilu dan terjadi *chaos* pasca pemilu, dosen maupun mahasiswa harus membawa gagasan dan ide sebagai kaum akademisi yang telah bertransformasi menjadi intelektual organik ke gelanggang demokrasi, seperti ruang publik untuk berdiskusi, berdialog, berdemonstrasi, dan lain-lain. Pada titik ini, kaum akademisi tidak hanya berada dalam “menara gading” konsep, teori, gagasan, dan ide yang dibahas di ruangan kelas selama bertahun-tahun atau yang dibaca di perpustakaan atau kamar pribadi setiap hari, tetapi turut terlibat dalam persoalan nyata masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia saat ini, khususnya persoalan demokrasi Indonesia yang sedang “sakit”. Dengan demikian, aktivitas dan karya kaum akademisi yang menyuarakan kritik dan memberi alarm kepada penguasa sebelum pemilu 2024 kemarin tidak berakhir sebagai kritisisme musiman dan tidak dianggap sebagai partisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Mengartikulasikan Pikiran dan Perasaan dengan Bahasa yang Tepat

Saat kaum akademisi dari berbagai kampus di Indonesia menyerukan kritik terhadap pemerintah, ada banyak masyarakat yang menganggap bahkan menyatakan seruan-seruan itu sebagai bagian dari kesombongan intelektual. Sebab, ada banyak akademisi yang secara sengaja ataupun tak sengaja mengatakan, orang-orang yang memilih Prabowo-Gibran adalah masyarakat kelas bawah atau yang berpendidikan rendah, bahkan menggunakan istilah khas Rocky Gerung, yaitu dungu. Akibatnya, ada banyak masyarakat yang antipati, tidak percaya dengan kritikan dan anjuran dari kaum akademisi, mengolok-olok kaum akademisi sebagai partisan, bahkan menjauhi kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh kaum akademisi.

Terhadap situasi semacam itu, kaum akademisi tidak boleh mempersalahkan masyarakat. Oleh karena itu, kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik. Sebab, Gramsci menyebutkan, intelektual organik selalu memberi wawasan tentang bahasa pengetahuan dan bahasa ekspresi yang tepat agar masyarakat dapat mengartikulasikan hal-hal yang mereka rasakan dan pikirkan.⁴⁷ Dalam hal ini, intelektual organik mengerti perasaan publik yang sudah terlanjur “dimanipulasi” oleh penguasa dengan menggunakan bahasa yang tepat.

⁴⁶ Bdk. Albertus Patty, *loc. cit.*

⁴⁷ Syarif Maulana, *loc. cit.*

Pertanyaannya ialah ‘mengapa kaum akademisi harus bertransformasi menjadi intelektual organik yang menggunakan bahasa secara tepat?’ Sebab, dalam buku *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*, Peter Tan berpendapat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mudah tersinggung dan menyeruduk di ruang publik karena bahasa. Bangsa ini mudah terpeleset karena bahasa. Bangsa ini mudah menghakimi dan membunuh dengan atau karena bahasa. Singkatnya, bangsa ini mudah kacau dan berantakan karena bahasa.⁴⁸

Kekacauan bahasa, lanjut Peter Tan, adalah cerminan kekacauan politik, pemahaman, karakter, dan mental sebuah bangsa. Begitu pun sebaliknya, kekacauan politik dan bangsa adalah cerminan kekacauan bahasa.⁴⁹ Maka, demokrasi kuat, kata Peter Tan, kalau bahasa dipakai secara benar untuk cita-cita luhur bangsa. Kita dituntut untuk berbahasa dengan melibatkan pemahaman. Untuk itu, bahasa yang kita pakai harus memperhatikan prinsip kejelasan, kebenaran, dan kejujuran.⁵⁰

Oleh karena itu, kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik yang tidak menyebut atau mengatakan rakyat bodoh, dungu, atau diksi-diksi sejenisnya karena diksi-diksi tersebut dapat membuat rakyat semakin menjauh, antipati, dan tidak percaya dengan pikiran, hasil penelitian, hasil riset, demonstrasi, maupun tindakan konkret kaum akademisi. Dengan menjadi intelektual organik, tugas kaum akademisi sekarang ialah memberi wawasan tentang marwah demokrasi dan situasi NKRI yang “sakit” dengan bahasa pengetahuan dan bahasa ekspresi yang tepat, agar masyarakat dapat mengartikulasikan hal-hal yang dirasakan, dipikirkan, atau yang didiamkan selama ini.

d. Memobilisasi Kesadaran Politik

Menurut Silvianus M. Mongko, sebagaimana tertulis dalam buku berjudul *Demokrasi Minus Diskursus*, salah satu bahaya politik yang mengancam keselamatan demokrasi modern ialah kemungkinan involusi sistem politik demokrasi menuju kediktatoran. Pada batas kejenuhan tertentu, lantaran pencapaian reformasi masih stagnan, secara spontan dan alamiah, pengalaman-pengalaman stabilitas nasional (otoriter-diktator) di masa lalu dibayangkan kembali.⁵¹ Bahaya ini, lanjut Mongko, perlu diantisipasi dan terus dicegah dengan membangun militansi dan kesadaran politik warga.⁵²

Oleh karena itu, supaya tidak kembali ke situasi otoriter-diktator, kesadaran politik masyarakat Indonesia harus dibentuk. Hemat penulis, pembentukan kesadaran politik masyarakat Indonesia hanya bisa dibuat oleh intelektual organik. Sebab, menurut Aimee Carrillo Rowe, *Professor of Communication Studies at California State University, Northridge*, intelektual organik mengacu pada pengetahuan kelompok-kelompok "organik" di mana mereka berada, sekaligus memobilisasi kesadaran politik di antara kelompoknya masing-masing dan berbicara atas nama mereka.⁵³ Di samping itu, menurut Gramsci, sebagaimana ditulis oleh Albertus Patty, intelektual organik adalah mereka yang dengan kesadaran dan pengetahuannya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda penguasa, berupaya melakukan pemberdayaan, membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah sosial yang dialami masyarakat, dan berkomitmen pada panggilan untuk membela

⁴⁸ Peter Tan, *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018), hlm. 152.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 153.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 153 – 154.

⁵¹ Silvianus M. Mongko, *Demokrasi Minus Diskursus* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 53.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Bdk. Aimee Carrillo Rowe, *loc. cit.*

kepentingan masyarakat yang sering menjadi korban hegemoni dan dominasi penguasa dan kaum oligarki.⁵⁴

Hal itu tidak bisa dibuat oleh intelektual tradisional. Sebab, menurut Gramsci, sebagaimana ditulis Albertus Patty, intelektual tradisional adalah mereka yang memberikan pengaruhnya dengan memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung kelas penguasa. Intelektual tradisional sering menjadi akademisi yang membeo dan bahkan menjustifikasi berbagai kebijakan yang salah dan merugikan rakyat yang dilakukan oleh penguasa negara, yaitu kaum oligarki.⁵⁵

Maka, kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik untuk membebaskan masyarakat dari jebakan ideologis yang dibuat oleh kaum borjuis lewat hegemoni di media sosial, serta menghancurkan atau menghapus “kesadaran palsu” dari masyarakat Indonesia yang telah diciptakan oleh penguasa seperti Jokowi. Sebab selama ini, Jokowi menciptakan “kesadaran palsu” melalui hal-hal praktis, seperti bantuan sosial menjelang pemilu, bagi-bagi kaus oblong saat blusukan atau mengunjungi daerah tertentu di Indonesia, bagi-bagi sepeda, dan lain-lain. Menurut Silvianus M. Mongko, dalam buku berjudul *Demokrasi Minus Diskursus*, ‘kaus oblong’ politik membuat rakyat terlena dari realitas politik hariannya sendiri. Daya tipu kaus oblong, nasi kotak, minuman instan, begitu mudah mengelabui kesadaran kritis masyarakat. Akibatnya, “kesadaran palsu” tercipta dalam diri masyarakat Indonesia.⁵⁶

Untuk itu, kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik guna memobilisasi kesadaran politik. Hemat penulis, mobilisasi kesadaran politik dapat dibuat melalui diskusi bersama, dialog, mempelajari buku tertentu secara bersama, menulis bersama, pelatihan keterampilan tertentu untuk mengontrol kebijakan penguasa, bahkan berdemonstrasi bersama di jalanan untuk memberikan kritik dan saran kepada penguasa, baik yang berkaitan dengan situasi politik seperti demokrasi, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan yang lainnya.

e. Menantang Struktur Kekuasaan yang Ada

Saat ini, susah untuk mengharapkan peran masyarakat untuk menjadi “oposisi abadi” bagi penguasa. Apalagi kalau kita mengharapkan peran partai politik yang sarat dengan kepentingan kelompok atau golongan. Oleh karena itu, hemat penulis, satu-satunya elemen masyarakat sipil yang dapat diharapkan untuk menjadi “oposisi abadi” bagi penguasa ialah intelektual organik.

Sebab, sebagaimana yang sudah ditulis sebelumnya, Amit Chaudhuri, dalam artikel berjudul “The Organic Intellectual, Mystical Poetry, and the Rationalist Tradition in India Today”, mengatakan, intelektual organik memainkan peran penting dalam mengadvokasi kepentingan kelas atau kelompok sosial mereka, menantang struktur kekuasaan yang ada, dan berkontribusi pada perubahan sosial.⁵⁷ Dalam hal ini, intelektual organik berani mengambil “jarak” dari penguasa, mengontrol penguasa, menantang penguasa, dan mengkritik penguasa, sehingga intelektual organik menjadi “oposisi abadi” bagi penguasa. Meminjam Ignas Kleden, Silvianus M. Mongko menjelaskan, demokrasi memerlukan keberanian untuk menegakkannya dari waktu ke waktu karena ia selalu dihadang oleh aneka persoalan dan tantangan yang bisa menyurutkan optimisme mewujudkan demokrasi di Indonesia.⁵⁸

⁵⁴ Bdk. Albertus Patty, *loc. cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Bdk. Silvianus M. Mongko, *op. cit.*, hlm. 86-88.

⁵⁷ Amit Chaudhuri, *loc. cit.*

⁵⁸ Silvianus M. Mongko, *op. cit.*, hlm. 52 – 53.

Oleh karena itu, menurut Dadang Juliantara, dalam buku *Meretas Jalan Demokrasi*, kontrol dari arus bawah memberikan jaminan bahwa kekuasaan dijalankan dengan orientasi utama kepada rakyat dan bila ia menyimpang dengan segera dikoreksi.⁵⁹ Pada titik ini, lanjut Juliantara, keterkaitan antara oposisi dan demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari prinsip yang mendasarinya, yakni penghargaan yang tinggi atas perbedaan. Dalam demokrasi, perbedaan bukan barang haram yang harus dimusuhi atau dijaui, melainkan bata merah yang tidak terpisahkan dari bangunan demokrasi. Tanpa adanya prinsip penghargaan pada perbedaan, oposisi akan hilang makna mendasarnya.⁶⁰ Senada dengan Juliantara, Silvianus M. Mongko juga mengatakan, demokrasi yang sehat mesti menghadirkan ‘pertentangan’ bukan persekongkolan, perdebatan bukan kompromistis.⁶¹ Atau dalam bahasa Felix Baghi, hal yang kita butuhkan dalam demokrasi ialah adanya pengakuan akan identitas nasional yang berbeda-beda dan memberi ruang yang bebas, setara, dan *fair* dalam setiap ekspresi politis.⁶²

Maka, oposisi menurut Juliantara mengandung unsur berikut: *Pertama*, independen. Suatu oposisi tentu saja bukan menjadi bagian dari kekuasaan, melainkan harus mengambil jarak agar dapat melakukan *check and balance* secara bebas. *Kedua*, merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, oposisi harus memiliki akses yang luas ke masyarakat, hingga ke satuan-satuan terkecil di desa-desa. Ini penting agar suara oposisi bukan sekadar kepentingan segelintir orang, melainkan merupakan wakil dari kepentingan banyak pihak.⁶³

Hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh intelektual organik. Sebab, intelektual organik mengadvokasi kepentingan kelas atau kelompok sosial mereka, menantang struktur kekuasaan yang ada, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Maka, untuk memperkuat demokrasi Indonesia di tengah “guncangan hebat” dari rezim anti demokrasi, kaum akademisi Indonesia perlu bertransformasi menjadi intelektual organik, bukan malah menjadi intelektual tradisional. Agar dengan demikian, aktivitas *civitas academica* atau kaum akademisi dari banyak Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia beberapa waktu belakangan ini, yaitu mengkritik, menantang, dan memberi alarm kepada penguasa, tidak hanya kritisisme musiman atau partisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi perwujudan diri sebagai intelektual organik dalam negara demokrasi.

Penutup

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, penulis dapat menyimpulkan, transformasi kaum akademisi menjadi intelektual organik untuk memperkuat demokrasi Indonesia adalah tuntutan dan hal yang mendesak saat ini. Sebab, demokrasi Indonesia membutuhkan “penyelamat” seperti intelektual organik, supaya demokrasi Indonesia tetap berdiri tegak dan tidak hancur oleh upaya-upaya penguasa yang ingin membawa Indonesia ke dalam situasi otoritarianisme, baik secara sengaja maupun tak sengaja. Oleh karena itu, kaum akademisi perlu bertransformasi menjadi intelektual organik untuk memperkuat demokrasi Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat dijauhkan dari bahaya otoritarianisme.

Daftar Pustaka

⁵⁹ Dadang Juliantara, *op. cit.*, hlm. 77.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

⁶¹ Silvianus M. Mongko, *op. cit.*, hlm. 50.

⁶² Felix Baghi, SVD., “Sekapur Sirih: Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi”, dalam Felix Baghi, SVD (ed.), *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi* (Mamere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 9.

⁶³ Dadang Juliantara, *loc. cit.*

Buku

- Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Juliantara, Dadang. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Kleden, Ignas. *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Mongko, Silvianus M. *Demokrasi Minus Diskursus*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Tan, Peter. *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.

Jurnal

- Chaudhuri, Amit. "The Organic Intellectual, Mystical Poetry, and the Rationalist Tradition in India Today". *Social Research: An International Quarterly*, Vol. 88, No. 4, Winter 2021.
- Maulana, Syarif. "Ruang Publik dan Intelektual Organik". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015.
- Rowe, Aimee Carrillo. "Romancing the Organic Intellectual: On the Queerness of Academic Activism". *American Quarterly*, Vol. 64, No. 4, December 2012.

Artikel Surat Kabar

- Sukidi. "Demokrasi di Ujung Kematian". *Kompas*, 4 Januari 2024.

Artikel Surat Kabar Daring

- Hakim, Ikhsan Abdul. "Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Tidak Boleh Kampanye untuk Kandidat Tertentu, Melanggar Hukum". *Kompas.tv*, 24 Januari 2024. <<https://www.kompas.tv/nasional/479737/pakar-hukum-tata-negara-presiden-tidak-boleh-kampanye-untuk-kandidat-tertentu-melanggar-hukum>>, diakses pada 11 Maret 2024.
- Hargens, Boni. "Pemilu 2024 dan Roh Demokrasi". *Kompas.id*, 18 November 2023. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/17/pemilu-2024-dan-roh-demokrasi>>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Indraswara, Angga. "Ketidakniscayaan Demokrasi Indonesia". *Kompas.id*, 5 Februari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/04/ketidakniscayaan-demokrasi-indonesia>>, diakses pada 13 Maret 2024.
- Patty, Albertus. "Intelektual Tradisional & Organik?". *Nalarpolitik.com*, 11 April 2021. <<https://nalarpolitik.com/intelektual-tradisional-organik/>>, diakses pada 17 Maret 2024.
- Piliang, Yasraf A. "Malu Menjadi Bangsa". *Kompas.id*, 5 Januari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/04/malu-menjadi-bangsa>>, diakses pada 9 Maret 2024.
- Piliang, Yasraf A. "Demokrasi Buruk Rupa". *Kompas.id*, 12 Februari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/11/demokrasi-buruk-rupa>>, diakses pada 12 Maret 2024.
- Werdiono, Defri. "Presiden Ikut Kampanye, secara Etika Politik Menjadi Masalah". *Kompas.id*, 24 Januari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/presiden-ikut-kampanye-secara-etika-politik-menjadi-masalah>>, diakses pada 12 Maret 2024.
- Wijayanto. "Memperkuat Budaya Demokrasi". *Kompas.id*, 22 Februari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/21/memperkuat-budaya-demokrasi>>, diakses pada 8 Maret 2024.
- Tim Kompas. "Presiden: Saya Sampaikan Ketentuan di UU Pemilu". *Kompas.id*, 27 Januari 2024. <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/26/presiden-saya-sampaikan-ketentuan-di-uu-pemilu>>, diakses pada 13 Maret 2024.